



Unit Penelitian dan Penerbitan
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

SASDAYA,
Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>

- ✍ Penulisan Inklusif di Prancis: Tantangannya bagi Politik Linguistik dan Transmisi Bahasa Prancis di Indonesia
- ✍ Inclusive Writing in France: Its Challenges for French Linguistic and Transmission Politics in Indonesia
- ✍ Penulis/Author(s) : Merry Andriani
- ✍ Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017), pp. 302-314
- ✍ DOI:
- ✍ Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

PENULISAN INKLUSIF DI PRANCIS: TANTANGANNYA BAGI POLITIK LINGUISTIK DAN TRANSMISI BAHASA PRANCIS DI INDONESIA

Merry Andriani¹

ABSTRACT

French society recently sparked a debate on the gender inclusive way of writing suggested by the *Haut Conseil d’Egalité*. Within the polemic of this new politic of linguistic, this article aims to describe the nature of the inclusive writing in French and why it is becoming the challenge to the politic of linguistic of French in Indonesia and its transmission in general. In order to expose these purposes, the sociolinguistic in critical approach is chosen to analyse the politic linguistic discourses aspects concerning this subject in diver French media. This research shows that despite the ideal purposes of inclusive writing system in French, there are a great potentiality that this new politic of linguistic will risk the transmission of French language in Indonesia. The difficulty is due to the complexity in the gender differentiation on the writing system adding a difficulty to the French learning which already well reputed as a difficult language to learn by the Indonesian public. The second problem is the uncertainty way of reading the new words using the median points, putting language instructors also in difficulty within their didactical task.

Keywords: French in Indonesia, language user, politic linguistic, sociolinguistic critic, inclusive writing

PENDAHULUAN

Polemik politik linguistik yang sedang ramai diperbincangkan di Prancis sejak awal tahun 2017 ini adalah keputusan penerapan sistem “*Ecriture Inclusive*” atau penulisan inklusif yang diajukan oleh Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (Komisi penasehat kesetaraan perempuan dan laki-laki). Badan yang sering dikenal juga dengan singkatan HCE ini merupakan badan khusus yang menempel pada Perdana Menteri, dibentuk melalui dekrit presiden François Holland dan perdana menteri Jean-Marc Ayrault pada tanggal 3 januari 2013.² Misi utamanya adalah untuk mendampingi masyarakat sipil dalam membangun kesadaran publik melalui debat terbuka mengenai orientasi politik dan hak-hak perempuan serta

¹ Mahasiswa Program Doktor (S.3) Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email : merry.andriani@mail.ugm.ac.id

² <http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/presentation-et-missions/>

kesetaraan. Pada tahun 2017 komisi ini mendapat misi baru yakni membuat laporan tahunan secara resmi tentang perkembangan situasi perbedaan gender di Prancis.

Salah satu produk dari komisi ini adalah beberapa buku panduan mengenai praktik-praktik kesetaraan gender yang dapat diunduh secara cuma-cuma di halaman website HCE. Praktik kesetaraan gender ini juga menyentuh ranah bahasa, mengingat bahasa Prancis adalah bahasa yang membedakan nomina berdasarkan gender feminin dan maskulin. Komisi HCE menerbitkan buku panduan penulisan inklusif pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menghindarkan penulisan stereotype gender pada berbagai komunikasi publik. Setelah dua tahun sejak diterbitkannya panduan ini, tidak banyak reaksi terdengar di ranah publik. Namun pada awal tahun 2017, sebuah penerbit buku ajaran sekolah di Prancis Hatier menerbitkan buku pelajaran Sekolah Dasar dengan menggunakan ejaan berdasarkan panduan penulisan inklusif tersebut, menimbulkan polemik panjang dan berbagai reaksi keras dari berbagai instansi. *Académie Française*³ yang merupakan lembaga resmi bahasa Prancis termasuk salah satu yang menolak dengan keras pemberlakuan sistem penulisan inklusif ini. Pro-kontra terhadap kebijakan politik linguistik ini harus dipahami tidak hanya dengan sudut pandang gender, namun juga linguistik.

PENULISAN INKLUSIF BAHASA PRANCIS

Definisi penulisan inklusif menurut situs khusus penulisan inklusif bahasa Prancis⁴ adalah semua upaya secara grafis maupun sintaksis yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan representasi perempuan dan laki-laki. Makna istilah inklusif di sini berbeda dengan konsep istilah inklusif yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia yang lebih mengedepankan ketercakupannya bagi kaum difabel. Pada prinsipnya menurut panduan penulisan inklusif yang disusun oleh Raphaël Haddad (Haddad, 2016) sistem baru ini memberlakukan empat peraturan penulisan dan linguistik baru sebagai berikut:

(a) Penyesuaian gender nomina pada sebutan untuk jabatan, pangkat, profesi dan gelar.

Penerapan aturan ini menimbulkan banyak perubahan dalam penyebutan berbagai jabatan, pangkat, profesi, dan gelar, bahkan banyak dibentuk istilah-istilah baru seperti :

(1) *doctor* (n,m)⁵ -> *doctoresse* (n,f)

Gelar/profesi Dokter (m) Gelar doktor/profesi Dokter (f)

(2) a. *auteur* (n,m) -> *autrice* (n,f)

profesi pengarang (m) profesi pengarang (f)

³<http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive>

⁴ <http://www.ecriture-inclusive.fr/>

⁵ Daftar singkatan n: nomina, adj: adjectif, m: masculin, f: feminin, s: singulier, p: plural

b. <i>professeur</i> (n,m)	-> <i>professeure</i> (n,f)
profesi dosen (m)	profesi dosen (f)
(3) <i>président</i> (n,m)	-> <i>présidente</i> (n,f)
presiden (m)	presiden (f)
(4) <i>Monsieur le maire</i>	-> <i>Madame la maire</i>
Bapak Walikota (m)	Ibu Walikota (f)

Sebutan lazim sebelumnya bagi walikota perempuan seperti pada contoh (4) adalah "*Madame le maire*" dengan menggunakan artikel "*le*" yang mengacu pada nomina definit maskulin, walaupun di depannya digunakan sebutan "*madame*" yang merujuk pada perempuan.

b) Penggunaan penanda maskulin dan feminim ketika menyebutkan satuan nomina yang berbeda jenis kelamin.

Dalam bahasa Prancis, penyebutan nomina jamak selalu dibedakan dengan penanda maskulin bagi kelompok nomina yang semuanya elemennya maskulin, penanda feminim jika semua komponen nomina tersebut adalah feminim dan penanda maskulin akan digunakan pada kelompok nomina yang komponennya bercampur feminim dan maskulin. Contohnya adalah sebagai berikut :

(5) a. <i>étudiant</i> (n,m,s)	- <i>étudiante</i> (n,f,s)
Mahasiswa (tunggal)	mahasiswa (tunggal)
b. <i>étudiants</i> (n,m,m+f,p)	- <i>étudiantes</i> (n,f,p)
Mahasiswa (jamak)	mahasiswa (jamak)

Aturan baru penulisan inklusif menghilangkan pola penulisan seperti yang ada pada contoh (5.b) di atas ini. Jika mengikuti aturan penulisan inklusif maka jika ada kelompok nomina yang terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan, maka semuanya harus ditulis dengan cara menempatkan titik-titik medial pada penanda feminim dan jamak di akhiran kata tersebut. Maka contoh (5.b) jika dituliskan dengan aturan tersebut akan berubah seperti berikut ini :

(6) <i>étudiant·e·s</i> (n,m+f,p)
(7) « <i>grâce aux agriculteur·rice·s, aux artisan·e·s et aux commerçant·e·s, la Gaule était un pays riche</i> ». ⁶
“berkat petani(n,m+f,p), pengusaha (n,m+f,p) dan pedagang (n,m+f,p), Galia telah menjadi negara kaya”

Penulisan dengan menggunakan titik medial ini menjadi hal baru yang sangat signifikan secara visual dan sekaligus kesulitan baru bagi siswa di sekolah maupun pembelajar Asing. Bagi siswa sekolah di Prancis, sistem penulisan dengan titik medial cukup menyulitkan dalam pelajaran dikte demikian juga bagi pengajarnya, cara membaca kata yang ditulis dengan titik medial sangat membingungkan. Pilihan

⁶ Cuplikan kalimat di buku acuan sekolah dasar di Prancis yang menerapkan aturan penulisan inklusif dan kemudian menjadi polemik.

lainnya untuk aturan penulisan yang kedua ini adalah dengan menuliskan satu persatu nomina sesuai dengan jenis kelaminnya seperti berikut:

(8) *Les cheffes et les chefs de services*

Pimpinan (n,f,p) dan pimpinan (n,m,p) pelayanan

(9) *Les décorateurs et les décoratrices*

Dekorator (n,m,p) dan dekorator (n,f,p)

(10) *Les maçonnes et les maçons*

Tukang (n,f,p) dan tukang (n,m,p)

(11) *Les chirurgiennes et les chirurgiens*

Ahli bedah (n,f,p) dan ahli bedah (n,m,p)

Istilah nomina feminim pada contoh (8) hingga (11) merupakan istilah bentukan baru yang tidak ada sebelumnya. Urutan penyebutan atau penulisannya mengacu pada susunan alfabetikal, jadi bisa yang disebutkan maskulin atau feminim terlebih dahulu. Kecuali dalam hal sapaan, *Madame* harus disebut terlebih dahulu sebelum *Monsieur*, contohnya : *Madame et monsieur*. Aturan penulisan model baru ini tentu saja tidak sederhana, baik bagi penutur asing maupun bagi orang Prancis sendiri.

c) Pemilihan terminologi yang generik bagi perempuan dan laki-laki

Aturan ini menganjurkan untuk menggunakan pemilihan kata yang netral untuk istilah-istilah umum seperti contohnya, penyebutan istilah *droits humains* (hak-hak asasi manusia) bukan seperti sebutan sebelumnya *droits de l'homme* (*homme* = manusia/pria). Strategi ini disebut juga dengan penggunaan istilah hermaprodit seperti : *membre, corps*, dll. Contohnya adalah sebagai berikut:

(12) *corps enseignants*

Corp pengajar

Hal ini dianggap cukup efektif untuk menghindari penulisan yang terlalu panjang jika menerapkan aturan pertama dan kedua yang mengharuskan menulis istilah “pengajar” dalam bentuk feminim dan maskulin (*enseignants et enseignantes*) atau dengan menggunakan titik-titik medial (*enseignant·e·s*). Namun persoalannya dengan aturan ini adalah keterbatasan repertoar kosakata yang bersifat hermaprodit seperti pada contoh di sini.

d) Penggunaan aturan yang disebut dengan “*accord de proximité*” dan tidak lagi menjadikan maskulin di atas feminim

Aturan “*accord de proximité*” atau penyesuaian terdekat ini merupakan aturan baru secara sintaksis dalam kalimat mengharuskan menulis kata sifat mengikuti jenis kelamin nomina yang letaknya terdekat atau menempel dengan adjektif. Contohnya adalah sebagai berikut :

(13) *Le collaborateur et la collaboratrice sont satisfaites.*

Para kolaborator (n,m,p) dan kolaborator (n,f,p) sudah puas (adj,f,p).

(14) *Les plombières et les plombiers sont occupés.*

Para tukang ledeng (n,f,p) dan tukang ledeng (n,m,p) sedang sibuk (adj,m,p).

Pada contoh (13) kata sifat *satisfait* atau “puas” harus dituliskan dalam bentuk feminim *satisfaite* karena nomina yang terdekat adalah *collaboratrice* yang berjenis kelamin feminim, serta tambahan akhiran “s” sebagai penanda jamak kedua nomina yang dirujuk. Sementara pada contoh (14) sebaliknya adjektif *occupé* atau “sibuk” dituliskan dengan bentuk maskulin karena kata benda yang terdekat adalah *plombier* yang juga maskulin. Sebelum ada aturan ini, lazimnya adjektif ditulis dalam bentuk maskulin jika menyangkut campuran dua nomina berbeda jenis kelamin, karena dianggap generik dan merepresentasikan kedua jenis gender dalam penggunaannya.

TANTANGAN POLITIK LINGUISTIK PENERAPAN PENULISAN INKLUSIF

Istilah politik linguistik yang dimaksud di sini merujuk pada definisi yang digunakan oleh Spolsky dan Shohamy yaitu segala upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun institusi dengan menggunakan kekuasaan untuk mengubah praktik kebahasaan atau ideologi orang lain (Spolsky dan Shohamy, 2000:1). Upaya penerapan aturan penulisan inklusif ini merupakan sebuah gerakan politik linguistik yang dimotori oleh aktivis feminisme di Prancis dan diwadahi oleh institusi resmi pemerintahan yaitu Haut Conseil d'Égalité (HCE). Berbagai kalangan memberikan reaksi pro dan kontra terhadap aturan baru penulisan inklusif ini di Prancis. Termasuk juga beberapa institusi pemerintahan seperti Menteri Pendidikan Nasional Prancis, *Academie française*, dan Perdana Menteri Prancis.

Academie française sebagai lembaga resmi bahasa Prancis mengeluarkan pernyataan resminya pada tanggal 26 oktober 2017 menolak sistem penulisan inklusif ini dengan pertimbangan bahwa terlalu banyak penanda ortografis dan sintaksis ini membuat bahasa menjadi terpecah, membingungkan dan sulit dibaca. Kesulitan yang ditimbulkan oleh aturan ejaan penulisan inklusif ini juga dianggap memberatkan tugas para pengajar. Dalam pernyataan resminya ini *Academie française* mengkritik penggunaan istilah “inklusif” yang digunakan secara berlebihan untuk menamai sistem penulisan yang tidak praktis dan justru menyulitkan pengguna bahasa. Penulisan inklusif bahasa Prancis ini dianggap sebagai potensi ancaman, dengan istilah yang cukup keras digunakan dalam pernyataan ini, yaitu “*peril mortel*” atau ancaman mematikan⁷.

Setelah pernyataan resmi dari *Academie française* ini, menyusul kemudian instruksi resmi Perdana Menteri Prancis Édouard Philippe pada tanggal 21 november 2017. Melalui edaran nota dinas bagi jajaran kementerian Prancis, pemerintah melarang penggunaan ejaan penulisan inklusif ini dalam semua teks

⁷ <http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive>

resmi pemerintahan. Kalimat yang digunakan oleh perdana menteri untuk larangan ini yang dicuplik melalui media *Le Monde* adalah sebagai berikut⁸:

(15) *"Je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive"*

"Saya mengajak untuk tidak menggunakan penulisan yang disebut inklusif, khususnya untuk teks yang akan dipublikasikan pada jurnal resmi Republik Prancis".

Pernyataan tersebut oleh berbagai media Prancis dianggap sebagai penutup dari polemik panjang selama tahun 2017 ini. Melalui pernyataan ini dapat digarisbawahi istilah "*l'écriture dite inclusive*" yang digunakan oleh Perdana Menteri Prancis. Ekspresi ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempercayai itikad inklusifitas yang hendak diusung oleh sistem penulisan inklusif tersebut. Kata "*dite*" yang artinya adalah "katanya/disebut/konon" yang terselip ditengah kata "*écriture inclusive*" menunjukkan ketidaksahihan. Bagi pemerintah aturan ejaan penulisan yang baru ini tidak betul-betul merepresentasikan inklusifitas bagi perempuan dan laki-laki. Justru sebaliknya hanya semakin mempersulit bahasa Prancis dan mengaburkan makna yang sesungguhnya dengan kerumitan sintaksis. Bagi Perdana Menteri Prancis sistem penulisan dengan menggunakan "*accord*" penyesuaian feminim dan maskulin seperti yang ada sekarang ini sudah sangat memadai. Dalam penulisan bentuk jamak, jenis maskulin dianggap sebagai bentuk netral yang dapat mewakili juga jenis feminim, berikut pernyataannya yang dicuplik dari media yang sama :

(16) *« le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aux femmes »*

"maskulin adalah bentuk netral jadi dapat digunakan untuk istilah-istilah yang mungkin diterapkan pada perempuan"

Prinsip bahwa bentuk maskulin yang netral dan mewakili bentuk feminim dalam penyebutan nomina jamak ini sebetulnya juga seringkali menjadi pertanyaan dalam praktik didaktik bahasa Prancis sebagai bahasa Asing di Indonesia. Publik Indonesia yang tidak mengenal perbedaan maskulin dan feminim dalam penyebutan nomina maupun adjektif, pada masa awal penggunaan bahasa Prancis seringkali mengalami kesulitan untuk menghafalkan sekian banyak kosakata beserta jenis kelaminnya. Bagi sebagian pengguna bahasa Prancis di Indonesia, penyesuaian gender nomina dengan adjektif ini atau yang dikenal juga dengan istilah "*accord*" merupakan salah satu kesulitan utama dalam menguasai bahasa Prancis. Kesalahan "*accord*" merupakan kesalahan yang paling sering ditemui dalam produksi tulis pengguna bahasa Prancis di Indonesia, terutama "*accord*" feminim yang harus menambahkan huruf "e" di belakang kata.

⁸ http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/11/21/le-premier-ministre-edouard-philippe-decide-de-bannir-l-ecriture-inclusive-des-textes-officiels_5

Namun demikian, publik Indonesia juga sering mempertanyakan dalam hal perbedaan gender maskulin atau feminim dalam bahasa Prancis, mengapa jika bentuk jamak yang terdiri dari campuran komponen kedua jenis gender ini menggunakan bentuk maskulin, kenapa bukan feminim? Pertanyaan yang sulit dijawab di kelas, biasanya pengajar akan menjawab dengan kilahan “memang begitu dari sananya”. Sebagai penutur asing bahasa Prancis, cukup sulit untuk memahami dan menjelaskan secara ilmiah mengenai perbedaan gender pada nomina leksikal bahasa Prancis ini.

Jika ditilik dari sejarah perkembangannya, bahasa Prancis merupakan bahasa yang didominasi oleh kekuasaan maskulin. Menurut sejarah tata bahasa Prancis seperti yang disampaikan oleh Raphaël Haddad pada media *La Libération*, aturan penggunaan bentuk maskulin sebagai bentuk netral jamak baru dimulai sejak abad ke-19. Sebelumnya penulis Prancis seperti Racine yang menulis *Athalie* pada tahun 1691 menuliskan: «*Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle*». Pada kalimat ini terdapat dua nomina yang berurutan yaitu “*courage (n,m)*” dan “*foi (n,f)*”. Jika mengikuti aturan “*accord*” secara gramatikal yang berlaku pada bahasa Prancis sekarang, kalimat ini harusnya menggunakan adjektif “*nouveaux (adj,m,p)*” bukan “*nouvelle*” yang berjenis feminim. Racine sudah menulis dengan menggunakan prinsip “*accord de proximité*” pada abad ke-17 sebagaimana yang diperjuangkan oleh kaum feminis Prancis tahun 2017. Jadi melalui ilustrasi ini dapat dilihat bahwa bahasa berkembang mengikuti masyarakat yang mendominasi dan berkuasa. Perempuan di Prancis sedikit sekali yang berkiprah di ranah publik, bahkan hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum baru didapatkan pada tahun 1944 dan dipraktikkan pertama kalinya dalam pemilu tahun 1945. Hal yang sangat kontras dengan kaum laki-laki di Prancis yang telah mendapatkan hak memilih dalam pemilu sejak tahun 1848.

Dalam praktik sosial di masyarakat Prancis, perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki cukup kental terasa, bahkan hingga jaman sekarang. Misalnya saja tentang gaji, untuk posisi atau jabatan yang sama yang dipegang laki-laki dan perempuan, biasanya perempuan akan menerima gaji 30% lebih rendah daripada laki-laki. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarga, istri dan anaknya. Padahal pada jaman sekarang peranan pemberi nafkah dalam keluarga ini sudah banyak bergeser. Pada topografi keluarga kontemporer seringkali perempuan yang menjadi orangtua tunggal, harus menghidupi juga keluarga dan anak-anak. Beberapa perusahaan atau institusi mulai mengubah sistem ini, namun belum ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengaturnya secara jelas. Maka tidak mengherankan jika banyak sosiolog, filsuf dan tokoh feminisme berasal dari Prancis, seperti Simone de Beauvoir.

Bahasa merepresentasikan masyarakat penuturnya, ketimpangan perbedaan gender dalam masyarakat Prancis ini dapat dilihat juga melalui contoh-contoh perbedaan makna pada kata yang sama dalam bahasa Prancis berikut ini :

Tabel 1: Perbedaan makna kosakata berdasarkan jenis gendernya yang berkembang dalam masyarakat berbahasa Prancis⁹

Maskulin		Feminim	
Kosakata	Makna	Kosakata	Makna
Professionnel	Orang yang disiplin, tegas dan rapi dalam pekerjaannya	Professionnelle	Perempuan prostitusi
Courtisan	Orang dekat Raja	Courtisane	Perempuan prostitusi
Entraîneur	Pelatih atlet	Entraîneuse	Perempuan prostitusi
Un homme facile	Laki-laki yang hidupnya mudah, tidak rumit	Une femme facile	Perempuan murahan
Un homme public	Orang terkenal	Une femme public	Perempuan prostitusi

Daftar contoh kata-kata sejenis itu dapat dituliskan lebih panjang lagi. Seorang linguist dan juga aktivis feminisme di Prancis Marina Yaguello pernah mengumpulkan korpus leksikal kosakata bahasa Prancis yang digunakan untuk menyebut “perempuan”. Hasilnya ia (Yaguello, 2002) mengidentifikasi ada sejumlah 175 kosakata yang bergradasi dari makna positif dan negatif untuk menyebut perempuan. Kutub positif dan negatif ini terbentuk atas representasi kontras perempuan oleh masyarakat Prancis, dikotomi perempuan terbelah antara sosok “ibu” atau “pelacur”.

Konotasi negatif seringkali dilekatkan pada kosakata yang berjenis feminim tanpa perimbangan dengan lawan jenisnya. Sebaliknya, jarang sekali ditemukan konotasi negatif ataupun olok-olokan pada leksikal maskulin. Sebetulnya hal ini juga terjadi dalam bahasa-bahasa lain di dunia, bukan hanya dalam bahasa Prancis saja. Misalnya saja dalam bahasa Indonesia, dikenal juga beberapa kosakata yang mengalami penempelan konotasi negatif terhadap perempuan, seperti “ayam” yang digunakan untuk menyebut prostitusi perempuan. Serta yang baru-baru ini sering dijadikan gurauan yaitu istilah “emak-emak naik métik” untuk menyimbolkan orang yang tidak mentaati aturan saat berkendara di jalan. Walaupun tidak mempertentangkan kedua jenis gender, namun dalam bahasa Indonesia penempelan konotasi negatif seringkali hanya pada perempuan atau kaum LGBT, jarang sekali pada laki-laki.

Sebagaimana disampaikan oleh Bourdieu (Bourdieu, 1982) bahwa bahasa merupakan arena pergulatan sosial yang dimulai dari dominasi simbolik hingga diskriminasi karena aksen wicara. Dalam arena berupa bahasa ini tercermin apa yang ada jauh di dalam pemikiran dan praktik sosial masyarakatnya. Maka dari itu Haddad dalam pengantarnya pada panduan penulisan inklusif (Haddad, 2016:4)

⁹ Majalah *Nouvel Observateur*, edisi dalam jaringan, diakses pada tanggal 5 desember 2017.

menyampaikan maksud utama pengaturan penulisan ini adalah untuk mempengaruhi pola pikir dan praktik sosial dalam masyarakat Prancis supaya lebih memberi tempat dan mengakui eksistensi perempuan, serta memulainya melalui bahasa.

Namun demikian, perdebatan mengenai sistem penulisan inklusif ini tidak berhenti semata pada proses usaha memperoleh kesetaraan eksistensi perempuan dan laki-laki, ada persoalan linguistik di dalamnya yang juga esensial. Seorang feminis kontemporer Prancis kelahiran Iran bernama Abnousse Shalmani mengkritik dan menolak keras pemberlakuan aturan penulisan inklusif ini. Shalmani pada sebuah wawancara di media *Le point*¹⁰ menyampaikan kekhawatirannya pada penerapan penulisan inklusif ini yang tidak saja merepotkan dan mengaburkan makna kalimat secara sintaksis, namun juga tidak menjamin adanya perbaikan secara konkrit kondisi perempuan dalam masyarakat. Pemaksaan sistem penulisan inklusif ini justru berpotensi meremehkan perempuan, karena setiap kali harus diingatkan supaya diberi tempat. Hal ini akan semakin membesarkan stigma bahwa perempuan itu lemah, tertindas dan harus diutamakan.

Bagi Shalmani, penulisan inklusif hanya merupakan bentuk kepura-puraan pemerintah Prancis untuk memperbaiki kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pergulatan demi kesetaraan perempuan dan laki-laki sangat mendominasi berbagai wacana dan narasi feminisme di Prancis yang lebih populer daripada kajian tentang gender itu sendiri. Hal yang serupa mengenai penggunaan istilah gender atau "*genre*" juga diutarakan oleh Wening Udasmoro dalam pengantar sebuah kumpulan penelitian mengenai gender yang berjudul "*Dari doing ke undoing gender*" (Udasmoro, 2017:v) bahwa istilah gender di Prancis lebih berorientasi pada perbedaan dikotomis perempuan dan laki-laki. Konteks Prancis yang sudah demikian diskriminatif membedakan hak publik perempuan dan laki-laki ini akan semakin diingatkan untuk membedakan kosakata feminim dan maskulin dalam berbahasa jika menggunakan sistem penulisan inklusif. Padahal yang paling diperlukan oleh perempuan di Prancis adalah kesamaan hak dan akses terhadap berbagai jenis pekerjaan, gaji yang setara, dan kesempatan untuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki di berbagai bidang seperti politik, teknik, kedokteran, sains, dan lain sebagainya, bukan perbedaan. Perubahan ejaan dalam penulisan bahasa Prancis tentu saja secara langsung tidak dapat mengubah situasi ini.

PENULISAN INKLUSIF DALAM TRANSMISI BAHASA PRANCIS DI INDONESIA

Dalam arena persaingan pasar bahasa Asing di Indonesia, bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa Eropa yang paling banyak dipelajari. Salah satu kelebihanannya adalah aksara yang digunakan bahasa Prancis masih sama dengan aksara bahasa Indonesia, yaitu aksara latin. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan bahasa Asing yang akan dipelajari oleh publik

¹⁰ Majalah *Le point*, edisi dalam jaringan, diakses pada tanggal 5 desember 2017

Indonesia. Menurut data dari operator Kedutaan Besar Prancis di Indonesia yaitu Institut Français Indonesia¹¹, setiap tahunnya terdapat tidak kurang dari 12.000 orang Indonesia yang mempelajari bahasa Prancis di berbagai pusat kebudayaan Prancis yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti: Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, Surabaya, dan Denpasar. Jumlah ini akan bertambah lagi jika memperhitungkan jumlah pengguna bahasa Prancis yang ada institusi pendidikan seperti SMA, SMK dan perguruan tinggi.

Mayoritas mereka yang mempelajari bahasa Prancis memiliki motivasi untuk keperluan studi, baik itu untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan yang diproduksi dalam bahasa Prancis, maupun untuk melanjutkan studi ke Prancis atau bekerja ke negara-negara frankofoni. Seperti diketahui, negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis tergabung dalam asosiasi yang dikenal dengan sebutan negara frankofon. Jumlahnya terus bertambah setiap tahun, saat ini negara anggota terdiri atas 56 negara, dan 19 negara pengamat. Kelompok negara-negara frankofoni ini tidak saja hanya mengembangkan kerjasama di bidang bahasa Prancis, namun lebih jauh lagi juga berkembang ekonomi frankofon yang mengembangkan arena pasar dan kerjasama khusus bagi negara-negara berbahasa Prancis. Melalui kekuatan frankofoni di belakangnya bahasa Prancis memiliki pola politik linguistik yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang lebih banyak dimotori oleh penyebarluasan budaya populer amerika di seluruh dunia.

Bagi pengguna bahasa Prancis di Indonesia, terdapat stereotype bahwa bahasa Prancis adalah salah satu bahasa yang sulit dikuasai, dan ini telah berkembang sejak awal transmisinya di Indonesia pada awal tahun 1970¹². Setelah melihat paparan mengenai penerapan sistem penulisan inklusif ini tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan memberikan kesulitan tambahan dalam penguasaan bahasa Prancis. Sejauh ini berbagai penelitian (baik di Indonesia maupun di beberapa negara anglofon) menunjukkan bahwa selain konjugasi (perubahan verba sesuai dengan pronomina subjek, waktu dan moda), *accord* (perubahan penanda sintaksis sesuai dengan jenis kelamin nomina dan jumlahnya) juga merupakan sumber kesalahan yang paling sering ditemui pada produksi tulis bahasa Prancis oleh publik Indonesia.

Hal ini dapat dipahami karena dalam produksi lisan, *accord* tidak terlalu kelihatan bedanya. Banyak kata diucapkan dengan cara yang sama, walaupun penulisannya berbeda, misalnya; *professeur* [profesoer] dan *professeure* [profesoer], pengucapannya tidak berbeda. Berikut di bawah ini terdapat beberapa contoh yang diambil dari produksi tulis pengguna bahasa Prancis di perguruan tinggi yang telah menggunakan bahasa Prancis selama kurang lebih dua tahun.

¹¹ <http://ifi-id.com>

¹² Andriani, Merry. (2016). "Negotiation by the Female Language User of French in Indonesia: A Sociolinguistic Critical Perspective". *Paper* dipresentasikan pada forum IGSCI. Yogyakarta : UGM

Tabel 2: Beberapa contoh kesalahan “accord” dalam produksi tulis oleh pengguna bahasa Prancis di Indonesia.

No	Contoh kata/kalimat	Kata/kalimat yang betul
(17)	<i>Je suis étudiante et je suis très indépendant.</i>	<i>Je suis étudiante et je suis très indépend<u>ante</u>.</i>
(18)	<i>Je suis étudiante à l’université. J’habite seul ici, à Yogyakarta.</i>	<i>Je suis étudiante à l’université. J’habite se<u>ule</u> ici, à Yogyakarta.</i>
(19)	<i>Un jeune homme positive.</i>	<i>Un jeune homme posit<u>if</u>.</i>
(20)	<i>Je m’interesse à la film...</i>	<i>Je m’int<u>é</u>resse au film...</i>
(21)	<i>Un connu entrepris doit conserver son nom d’entreprise.</i>	<i>Un<u>e</u> entrepris<u>e</u> conn<u>ue</u> doit prendre en considération son nom.</i>
(22)	<i>On trouve qu’une technologie qui devient plus sophistiqué...</i>	<i>On trouve qu’une technologie qui devient plus sophistiqué<u>e</u>...</i>
(23)	<i>Le nouveau façon de recycler..</i>	<i><u>La nouvelle</u> façon de recycler..</i>
(24)	<i>Le bon qualité</i>	<i><u>La bonne</u> qualité</i>
(25)	<i>L’humidité qui est toujours garder par les employés.</i>	<i>L’humidité qui est toujours gard<u>ée</u> par les employés.</i>
(26)	<i>Si les aspects dedans sont dans un bon condition.</i>	<i>Si les aspects dedans sont dans <u>une bonne</u> condition.</i>

Melalui contoh-contoh kesalahan ini dapat diambil dua pola kesalahan pengguna bahasa Prancis terkait *accord* yaitu pertama kekeliruan dalam menentukan jenis gender feminim atau maskulin pada nomina, yang menyebabkan kesalahan *accord*. Pola kedua adalah kealpaan dalam menuliskan *accord* yang sesuai dengan nominanya. Pada contoh (17) dan (18) melalui *accord* pada kata “*étudiant*” dengan tambahan “e” menjadi “*étudiante*” memberikan informasi bahwa pronomina subjek “*je*”(saya) adalah seorang perempuan. Berdasarkan jenis gender pronomina subjek ini, semua adjektif harus menyesuaikan menggunakan *accord* feminim dengan menambahkan huruf “e” di akhiran kata. Maka kata sifat berikutnya yang mengikuti juga harus dituliskan dengan menambahkan huruf “e” hingga menjadi “*indépendante*” pada contoh (17) dan “*seule*” pada contoh (18).

Tatabahasa bahasa Prancis membedakan sekali penggunaan gender feminim dan maskulin, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya melalui konjugasi verba dan *accord* kata sifat, dapat langsung diketahui apakah kata ganti subjek orang pertama tunggal (saya, aku) adalah seorang perempuan atau laki-laki. Hal ini tidak ditemui dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat membaca sebuah novel tanpa mengetahui apakah “saya” yang bernarasi adalah seorang perempuan atau laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena dalam tatabahasa bahasa Indonesia tidak dikenal sistem konjugasi maupun *accord*.

Maka dari itu jika menggunakan analisis interferensi, maka dapat dimaklumi jika publik Indonesia seringkali alpa dalam menuliskan *accord* pada bahasa Prancis.

Pemberlakuan ke-empat prinsip sistem penulisan inklusif akan memberikan beban tambahan terkait *accord* bagi pengguna bahasa Prancis di Indonesia. Sementara sistem "*accord*" sederhana yang berlaku sekarang masih belum dikuasai, akan dipersulit lagi dengan penerapan aturan "*accord de proximité*" seperti yang telah dijelaskan di awal tulisan ini. Jika diperhatikan semua contoh (17) hingga (26) kesalahan yang ditemukan mayoritas adalah kealpaan terhadap *accord* feminim. Dalam beberapa kasus, kealpaan ini dapat ditolerir jika dipergunakan bentuk jamak yang netral. Namun dengan aturan penulisan inklusif, hal ini tidak lagi dibenarkan. Bentuk jamak harus dituliskan dengan menggunakan titik medial, tambahan huruf "e" dan "s" beserta titik tengah pada akhiran kata, atau dengan menuliskan kedua nomina dengan kedua jenis gender. Dengan menggunakan prinsip penulisan inklusif maka contoh kalimat (25) harus ditulis dengan alternatif hingga menjadi seperti berikut ini :

(26) a. *L'humidité qui est toujours gardée par les employé·e·s.*

b. *L'humidité qui est toujours gardée par les employés et les employées.*

Secara teknis pengetikan dengan menggunakan titik medial juga memerlukan keterampilan baru untuk menampilkan simbol ini pada perangkat komputer. Kerumitan baru ini kemudian dapat saja menimbulkan pertanyaan, bagaimana kerepotan menambahkan simbol dalam penulisan ini dapat berkontribusi untuk memperbaiki nasib perempuan? Belum lagi kerumitan dalam menghafalkan kosakata baru untuk menyebut berbagai profesi, gelar dan jabatan dengan istilah-istilah baru. Bahasa Prancis akan menjadi semakin rumit.

Meskipun perdebatan tentang penerapan sistem penulisan inklusif ini telah ditutup dengan keputusan Perdana Menteri Prancis yang dengan tegas melarang penggunaannya dalam teks resmi pemerintahan. Namun menteri pendidikan nasional Prancis, masih menyisakan peluang penerapannya dengan memberikan kebebasan bagi berbagai percetakan untuk menerbitkan buku dengan menggunakan ejaan penulisan inklusif ini. Berbagai jejak pendapat di media juga menunjukkan bahwa 60% penduduk Prancis menyatakan setuju dengan penulisan inklusif meskipun dengan berbagai catatan. Jika menilik pola-pola debat publik dalam berbagai polemik di Prancis, bukanlah hal yang mustahil jika dalam tempo lima tahun ke depan sistem penulisan inklusif ini akan resmi dipergunakan oleh pemerintah Prancis.

KESIMPULAN

Polemik penerapan sistem penulisan inklusif masih memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Meskipun dianggap rumit dan mengaburkan makna sintaksis dalam kalimat bahasa Prancis, keempat aturan baru penulisan inklusif ini mulai digunakan pada buku panduan pelajaran Sekolah Dasar di Prancis. Pada beberapa media press juga dapat ditemukan penulisan dengan pola inklusif. Peluang kebebasan bagi percetakan untuk memproduksi buku-buku dalam ejaan penulisan

inklusif, memberikan ruang tumbuh yang sangat luas. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan sistem ini akan diadopsi oleh bahasa Prancis dan juga diterapkan dalam didaktik bahasa Prancis sebagai bahasa Asing.

Namun demikian perlu dipertimbangkan teknik gramatikal yang lebih sederhana dalam sistem penulisan inklusif ini demi mempertahankan kemudahan transmisi bahasa Prancis di tengah persaingan pasar bahasa Asing di dunia, khususnya pada konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Merry. 2016. *Negotiation by the Female Language User of French in Indonesia: A Sociolinguistic Critical Perspective. Proceeding seminar*. Paper dipresentasikan pada forum IGSCI. Yogyakarta : UGM
- Bourdieu, Pierre. 1970. *La reproduction: éléments pour une théorie du système d'enseignement*. (Reproduksi: elemen bagi teori sistem pengajaran). Paris: Les Editions de Minuit.
- Bourdieu, Pierre. 1982. *Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques*. (Apa yang dimaksudkan wicara: ekonomi pertukaran linguistik). Paris: Fayard.
- Haddad, Raphaël. 2016. *Manuel d'écriture inclusive: Faites progresser l'égalité femmes/hommes par votre manière d'écrire*. (Manual penulisan inklusif: Memajukan kesetaraan perempuan/laki-laki dengan cara Anda menulis). Paris: Mots-clés.
- Haut Conseil d'Égalité. 2017. *Guide de la parité: Des lois pour le partage à l'égalité des responsabilités politiques, professionnelles et sociales*. (Panduan kesetaraan: Undang-undang untuk berbagi kesetaraan tanggung-jawab politik, profesional dan sosial). Paris: HCE.
- Spolsky, Bernard & Shohamy, Elana (2000). Language practice, language ideology, and language policy. In *Language policy and pedagogy*. Spolsky Bernard, Shohamy Elana (Eds). Amsterdam: John Benjamin Publishing.
- Udasmoro, Wening. 2017. *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme*. Yogyakarta: UGM Press.
- Yaguello Marina. 2002. *Les mots et les femmes*. (Kata-kata dan perempuan). Paris : Payot.